

ISSN (Print) : 1412-7601
ISSN (Online) : 2654-8712
Volume 9, No. 2 September 2022
<http://www.ekonobis.unram.ac.id>

EKONOBIS

PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH BERDASARKAN FUNGSI PENDIDIKAN, KESEHATAN, PELAYANAN UMUM PADA KABUPATEN/KOTA DI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016-2020.

Siti Sriningsih, Irwan Suriadi

Universitas Mataram

ARTICLE INFO

Keywords:

Government Expenditure, Covid 19, West Nusa Tenggara

ABSTRACT : *This article analyzes the development of government spending on various functions of a descriptive quantitative approach that examines and calculates any changes in government spending based on the functions of education, health, public services, secondary data used from 2016-2020. The source of the data is obtained from djpk Kemenku. Composition of Regency/City Government Expenditures Based on Function, 2016-2020 in general underwent changes. Starting in 2020, with the special conditions of the COVID-19 pandemic, Regency/City Government spending based on functions in composition will still be dominated by public service functions. However, the public service function experienced a significant change in proportion in 2020 when compared to the proportion in previous years with a proportion of 2-7 percent in 2019 and then 2-17 percent in 2020.*

Kata Kunci:

Pengeluaran Pemerintah, Covid 19, Nusa Tenggara Barat

ABSTRAK: *Artikel ini menganalisis perkembangan pengeluaran pemerintah pada berbagai fungsi pendekatan deskriptif kuantitatif yang mengkaji dan menghitung setiap perubahan pengeluaran pemerintah berdasarkan fungsi pendidikan, kesehatan, pelayanan umum, Data sekunder yang digunakan mulai tahun 2016-2020. Sumber data di peroleh dari djpk kemenku. Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Berdasarkan Fungsi, tahun 2016-2020 secara umum mengalami perubahan. Mulai tahun 2020 dengan adanya kondisi khusus pandemik COVID 19, belanja Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan fungsi secara komposisi tetap didominasi oleh fungsi pelayanan umum. Namun pada fungsi pelayanan umum mengalami perubahan proporsi yang cukup signifikan pada tahun 2020 bila dibandingkan dengan proporsi tahun-tahun sebelumnya dengan proporsi sebesar 2 - 7 persen pada 2019 lalu menjadi 2 - 17 persen pada 2020.*

Corresponding Author : Siti Sriningsih

Alamat : Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Jln. Majapahit No. 62 Mataram.

e-mail: sitisriningsih@unram.ac.id

PENDAHULUAN

Latar Belakang

1. Pengeluaran pemerintah sesuai dengan kebijakan fiskal, yaitu pemerintah dalam menjalankan perekonomian dibutuhkan perannya, yang tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya terkait menyediakan alokasi pelayanan public dalam menunjang pertumbuhan ekonomi maka pengeluaran di distribusikan untuk berbagai fungsi. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang diperbaharui oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, bahwa klasifikasi belanja pemerintah menurut fungsinya dibagi menjadi 9 (Sembilan) fungsi yaitu, fungsi kesehatan, pendidikan, perumahan dan fasilitas umum, pelayanan umum, ekonomi, pariwisata dan budaya, ketertiban dan ketentraman, lingkungan hidup, dan perlindungan sosial.
2. Beberapa komponen belanja publik dipandang lebih produktif dibandingkan dengan yang lain dalam hal pengaruhnya terhadap kegiatan perekonomian, suatu negara dapat meningkatkan ekonominya dengan mengubah tingkat komposisi belanja publik (Devino et al. 2019). Pengeluaran pemerintah pusat dan daerah meliputi peralatan militer, jasa, jalan, dan pengeluaran lainya tidak termasuk pada pembayaran transfer individu seperti jaminan sosial dan kesejahteraan (Mankiw, 2003: 253).
3. Pandangan Keynes tentang pentingnya peran pemerintah dalam perekonomian melalui kebijakan fiskal dalam menstabilkan kondisi ekonomi yang buruk, dan dalam menstabilkan investasi yang mengalami penurunan, maka pemerintah mengatur pengeluarannya di dalam mendukung perbaikan ekonomi (Pressman, 2006:140). Begitu pula yang diungkapkan Musgrave bahwa peran pemerintah diperlukan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan untuk meningkatkan standar kehidupan yang layak dimana fungsi

pemerintah disini adalah untuk fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi, fungsi-fungsi ini dimaksudkan sebagai bentuk pelayanan pemerintah terhadap publik (Musgrave dan Musgrave, 2003:7)

4. Seperti pada literature empiris yang menganalisis masalah pengeluaran pemerintah (Arin et al., 2019) bahwa

adanya dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, begitu pula dalam studi empiris (Afonso et al., 2016) yang menekankan pada pengeluaran publik seperti pendidikan dan infrastruktur dalam jangka panjang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1. Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Persen), 2016-2021

Wilayah Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Lombok Barat	4.07	4.94	-0.89	0.73	-8.70	1.62
Kabupaten Lombok Tengah	4.60	5.44	2.20	1.53	-12.91	2.24
Kabupaten Lombok Timur	4.36	5.40	2.63	2.30	-10.54	1.38
Kabupaten Sumbawa	4.38	5.86	3.21	2.30	-12.25	-0.07
Kabupaten Dompu	3.66	5.23	2.91	1.34	4.97	0.98
Kabupaten Bima	4.14	5.14	2.98	1.63	-6.63	0.31
Kabupaten Sumbawa Barat	4.15	-21.59	-36.30	-5.26	33.97	-2.55
Kabupaten Lombok Utara	4.18	5.10	-1.78	3.41	-16.00	-0.63
Kota Mataram	5.88	5.95	2.98	1.89	8.82	2.68
Kota Bima	3.60	4.53	2.66	1.47	7.83	1.31

Sumber: BPS NTB

Tabel 1 menunjukkan laju pertumbuhan PDRB per kapita yang cenderung menurun dari tahun ke tahun. Penurunan terjadi pada tahun 2019, 2020, 2021 hampir pada semua kabupaten/kota yang ada. Kondisi ini tidak terlepas dari adanya wabah Covid-19 yang terjadi di NTB bahkan sampai seluruh wilayah Indonesia. Adanya kondisi wabah Covid-19 yang melanda secara global. Sehingga

berbagai upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pertumbuhan dengan cara meningkatkan pengeluaran pemerintah di berbagai fungsi.

5. Tulisan ini, akan menganalisis perkembangan pengeluaran pemerintah pada berbagai fungsi, dengan melakukan perhitungan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Setelah dilakukan perhitungan, dilakukan

pemeringkatan. Setelah itu, kemudian uraikan masing-masing dimensi yang ditinjau. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, artikel ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama memberikan pengantar dan latar belakang. Kemudian akan melihat perkembangan pengeluaran perfungsi dengan pendekatan deskriptif kuantitatif..

KAJIAN PUSTAKA

Pertumbuhan untuk jenis pengeluaran pemerintah bisa berfluktuasi di sebabkan beberapa faktor yaitu faktor pertumbuhan pendapatan perkapita, teknis (tehnologi), faktor perubahan populasi, faktor biaya relative dari jasa publik, dan faktor urbanisasi. Namun pengeluaran ini harus dibedakan apakah sebagai pengeluaran barang dan jasa dan pengeluaran untuk transfer (Musgrave dan Musgrave, 1993:122).

Teori perkembangan pengeluaran pemerintah oleh Rostow dibedakan menjadi tiga yaitu: tahap awal, menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal dibutuhkan persentase yang besar didalam menyiapkan sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya, karena investasi

pemerintah sangat diperlukan terhadap total investasi. Pada tahap menengah Rostow berpendapat bahwa masuknya peran investasi swasta semakin besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk tahap lanjut bahwa pembangunan ekonomi dari aktivitas pengeluaran sosial beralih ke penyediaan prasarana dan program pelayanan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang mengkaji dan menghitung setiap perubahan pengeluaran pemerintah berdasarkan fungsi pendidikan, kesehatan, pelayanan umum, Data sekunder yang digunakan mulai tahun 2015-2020. Sumber data di peroleh dari djpk kemenku

PEMBAHASAN

Dalam UU nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya pada pasal 11 ayat (5) dan dalam keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/PUU-XI/2013, dinyatakan bahwa belanja pemerintah pusat dapat diklasifikasikan menjadi per fungsi dan organisasi. Pengklasifikasian berdasarkan fungsi dibagi menjadi 11 fungsi yang menyangkut beberapa aspek dalam

pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ke 11 fungsi tersebut adalah: (1) fungsi layanan publik; (2) fungsi pertahanan; (2) fungsi ketertiban umum dan keselamatan; (4) fungsi ekonomi; (5) fungsi lingkungan; (6) fungsi perumahan dan fasilitas umum; (7) fungsi pelayanan kesehatan umum; (8) fungsi pariwisata; (9) fungsi keagamaan; (10) fungsi pendidikan publik; dan (11) fungsi perlindungan sosial dan keadilan (Zahara, dkk., 2020).

Berlanjut pada pembagian urusan pemerintah menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Bab III, Pasal 10-14 di sebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pusat, provinsi, kabupaten/Kota. Pemerintah Pusat mengurus: (a) politik luar negeri, (b) pertahanan, (c) keamanan, (d) yustisi, (e) moneter dan fiskal nasional, dan (f) agama. Adapun urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi meliputi: (a) perencanaan dan pengendalian pembangunan; (b) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; (c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; (d) penyediaan sarana dan prasarana umum; (e) penanganan bidang kesehatan; (f) pendidikan dan alokasi sumber daya

manusia potensial; (g) penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota; (h) pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota; (i) fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota; (j) pengendalian lingkungan hidup; (k) pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota; (l) pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; (m) pelayanan administrasi umum pemerintahan; (n) pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/ kota. (o) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan (p) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundangundangan.

Sedangkan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota meliputi: (a) perencanaan dan pengendalian pembangunan; (b) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; (c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; (d) penyediaan sarana dan prasarana umum; (e) penanganan bidang kesehatan; (f) penyelenggaraan pendidikan; (g) penanggulangan masalah sosial; (h)

elayanan bidang ketenagakerjaan; (i) fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; (j) pengendalian lingkungan hidup; (k) pelayanan pertanahan; (l) pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; (m) pelayanan administrasi umum pemerintahan; (n) pelayanan administrasi penanaman modal; (o) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan (p) urusan wajib

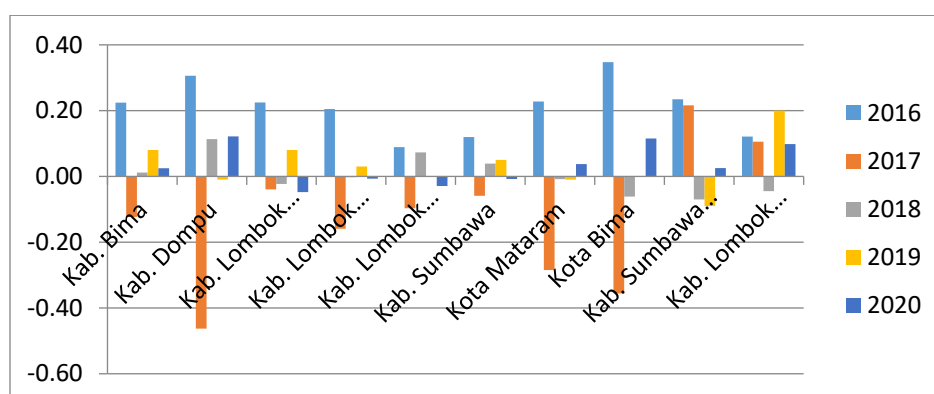
lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundangundangan. Perkembangan Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Fungsi Pendidikan Perkembangan belanja pemerintah fungsi kesehatan memberikan gambaran bagaimana peningkatan dan penurunan jumlah belanja yang dialokasikan di bandingkan tahun sebelumnya seperti yang terlihat pada tabel 1 dan gambar 1.

Tabel 2. Persentase Peningkatan dan Penurunan Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan pada Kabupaten/Kota di NTB Tahun 2016-2021

Kabuapten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Bima	0,22	-0,12	0,01	0,08	0,02
Kab. Dompu	0,31	-0,46	0,11	-0,01	0,12
Kab. Lombok Barat	0,22	-0,04	-0,02	0,08	-0,05
Kab. Lombok Tengah	0,20	-0,16	0,00	0,03	-0,01
Kab. Lombok Timur	0,09	-0,10	0,07	0,00	-0,03
Kab. Sumbawa	0,12	-0,06	0,04	0,05	-0,01
Kota Mataram	0,23	-0,28	-0,01	-0,01	0,04
Kota Bima	0,35	-0,36	-0,06	0,00	0,12
Kab. Sumbawa Barat	0,23	0,22	-0,07	-0,09	0,03
Kab. Lombok Utara	0,12	0,11	-0,04	0,20	0,10

Sumber: djpk kemenku (diolah)

Gambar 3. Persentase peningkatan dan penurunan belanja pemerintah fungsi pendidikan



Tabel 2 dan gambar 1 dapat terlihat bahwa dalam periode 2016-2020, sebagian besar anggaran Belanja Pemerintah pada Kabupaten Kota yang dialokasikan untuk melaksanakan fungsi pendidikan berfluktuasi dengan peningkatan yang berbeda. Seperti yang terlihat hampir diseluruh Kabupaten/Kota terjadi penurunan alokasi pengeluaran fungsi pendidikan. Perbedaan persentase pada belanja perfungsi disebabkan oleh jumlah penduduk yang berbeda, serta kondisi pelayanan terkait pendidikan seperti fasilitas sekolah serta penunjang tenaga pendidikan yang berbeda. Pada tahun 2017 alokasi pengeluaran pemerintah turun di 8 daerah, tahun 2018

hanya 5 daerah. Tahun 2019 dan tahun 2020 peningkatan pengeluaran berkisar pada 0-20%. Kondisi ini diakibatkan oleh adanya wabah Covid-19 yang realokasinya digunakan untuk kesehatan. Kondisi peningkatan dan penurunan akan di perjelas pada gambar 1.

Perkembangan Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Fungsi Kesehatan

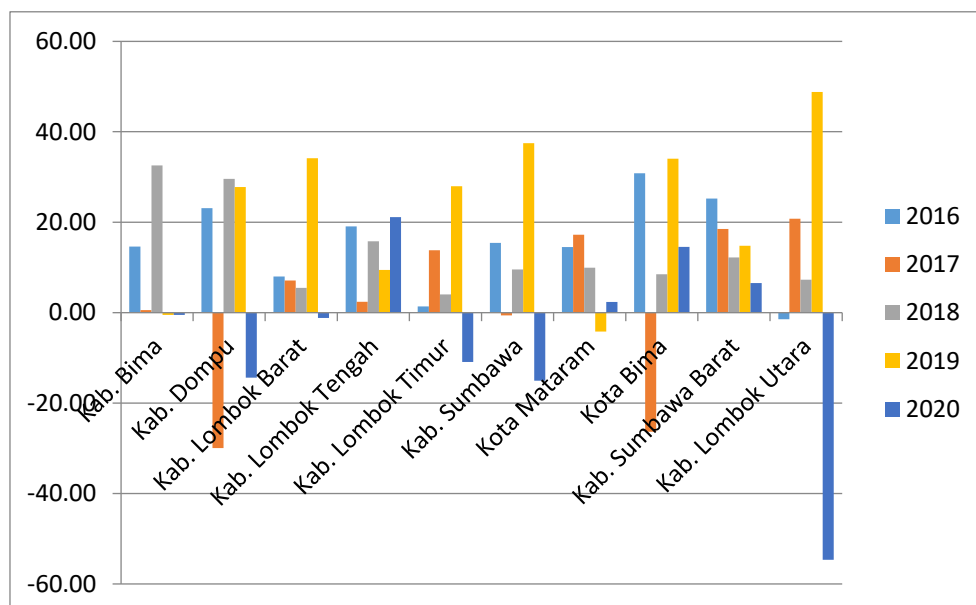
Perkembangan belanja pemerintah fungsi kesehatan memberikan gambaran bagaimana peningkatan dan penurunan jumlah belanja yang dialokasikan di bandingkan tahun sebelumnya seperti yang terlihat pada tabel 2 dan gambar 2.

Tabel 3. Persentase Peningkatan dan Penurunan Belanja Pemerintah Fungsi Kesehatan pada Kabupaten/Kota di NTB Tahun 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Bima	14,62	0,55	32,56	-0,51	-0,49
Kab. Dompu	23,10	-29,94	29,58	27,76	-14,38
Kab. Lombok Barat	7,99	7,11	5,47	34,13	-1,20
Kab. Lombok Tengah	19,05	2,40	15,78	9,42	21,13
Kab. Lombok Timur	1,37	13,78	4,01	27,96	-10,91
Kab. Sumbawa	15,41	-0,63	9,55	37,48	-15,04
Kota Mataram	14,50	17,21	9,94	-4,18	2,34
Kota Bima	30,80	-26,35	8,48	34,02	14,54
Kab. Sumbawa Barat	25,23	18,49	12,19	14,78	6,53
Kab. Lombok Utara	-1,48	20,77	7,26	48,79	-54,65

Sumber: djpk kemenku (diolah)

Gambar 2. Persentase peningkatan dan penurunan belanja pemerintah fungsi Kesehatan



Tabel 2 dan gambar 2 dapat terlihat bahwa dalam periode 2016-2020, belanja yang dialokasikan untuk melaksanakan fungsi kesehatan berfluktuasi dengan peningkatan yang berbeda. Tahun 2017 Kabupaten Dompu dan kota Bima. Tahun 2020. 4 kabupaten seperti Lombok Barat, Dompu, Sumbawa, Lombok Utara, Lombok Timur mengalami penurunan di bandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini tidak terlepas pada belanja yang hanya

berfokus pada penanganan Covid-19, sedangkan kegiatan yang bersifat fisik pengeluarannya dikurangi. Perkembangan Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Fungsi Pelayanan Umum Perkembangan belanja pemerintah fungsi pelayanan umum memberikan gambaran bagaimana peningkatan dan penurunan jumlah belanja yang dialokasikan di bandingkan tahun sebelumnya seperti yang terlihat pada tabel 3 dan gambar 3.

Tabel 4. Persentase Peningkatan dan Penurunan Belanja Pemerintah Fungsi Pelayanan Umum pada Kabupaten/Kota di NTB Tahun 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Bima	20,6	5,5	9,5	2,5	8,0
Kab. Dompu	17,4	30,2	-40,3	7,5	8,1
Kab. Lombok Barat	7,0	9,9	3,8	1,9	14,7
Kab. Lombok Tengah	18,3	11,1	10,6	7,5	10,8
Kab. Lombok Timur	12,0	8,6	14,5	4,4	6,4
Kab. Sumbawa	22,6	14,8	-3,5	1,8	2,3

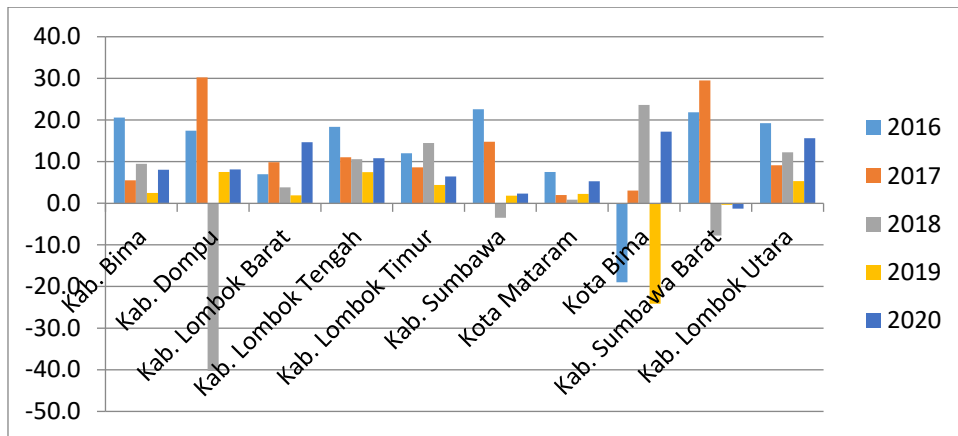
Kota Mataram	7,5	2,0	0,9	2,2	5,3
Kota Bima	-19,0	3,0	23,6	-24,1	17,2
Kab. Sumbawa Barat	21,8	29,5	-7,8	-0,4	-1,3
Kab. Lombok Utara	19,2	9,1	12,2	5,3	15,6

Sumber: djpk kemenku (diolah)

Belanja yang dialokasikan untuk melaksanakan fungsi pelayanan umum berfluktuasi dengan peningkatan yang berbeda, terlihat pada tabel 3 dan gambar 3 dapat terlihat bahwa dalam periode 2016-2020. Berbeda dengan pengeluaran pemerintah pada fungsi

pendidikan dan kesehatan bahwa di pengeluaran fungsi pelayanan umum cenderung mengalami peningkatan disemua daerah, hanya Kabupaten Sumbawa Barat yang pengeluarannya menurun selama tiga tahun, karena hanya berfokus pada penanganan Covid-19.

Gambar 2. Persentase peningkatan dan penurunan belanja pemerintah fungsi pelayanan umum



PENUTUP

Kesimpulan

Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Berdasarkan Fungsi, Tahun 2016-2020 secara umum mengalami perubahan. Mulai tahun 2020 dengan adanya kondisi khusus pandemik COVID 19, belanja Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan fungsi

secara komposisi tetap didominasi oleh fungsi pelayanan umum. Namun pada fungsi pelayanan umum mengalami perubahan proporsi yang cukup signifikan pada tahun 2020 bila dibandingkan dengan proporsi tahun-tahun sebelumnya dengan proporsi sebesar 2 - 7 persen pada 2019 lalu menjadi 2 - 17 persen pada 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Afonso, A., Kazemi, M. (2016). Assessing public spending efficiency in 20 OECD countries. *Working Papers ISSN 2183-1815*. Lisbon School Of Economics & Management. <https://depeco.iseg.ulisboa.pt/wp/wp122016.pdf>
- Arin, K. P., Braunfels, E., Doppelhofer, G. (2019). Revisiting the growth effects of fiscal policy: A Bayesian model averaging approach, *Journal of Macroeconomics* 62. 103158. DOI: 10.1016/j.jmacro.2019.103158
- Badan Pusat Statistik NTB. (2020). Data dan tabel Produk Domestik Regional Bruto 2016-2020. BPS NTB. Mataram
- Devino, Jose Angelo., Maciel. Daniel TGN., Sosa.Wilfredo (2019). Government size, composition of public spending and economic growth in Brazil. *Journal Pre-proof* 6 August 2019. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2020.06.001>
- Kementerian Keuangan. (2020). Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2021. Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran.
- Musgrave, Ricard.A. & Musgrave, Peggy.B.(2003). *Kuangan negara dalam teori dan praktek*. Jakarta, Erlangga
- Mankiw , N. Gregory. (2003). *Macroeconomics . Seventh Edition*. Worth Publishers. ISBN-13: 978-1-4292-1887-
- Pressman, S., (2000). *Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia*. Alih Bahasa Triwibowo Budi
- Zahara, Ervita Luluk., Andini, Mutiara Shinta., Wulandari, Savitri.,(2020). *Perkembangan Komposisi Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi, Jenis dan Organisasi Tahun 2018-2021*. Refrensi.